



RADIKALISME DI INDONESIA: Antara Historisitas dan Antropisitas

Ahmad Asrori
IAIN Raden Intan Lampung
ahmadasrori.trb@g.mail.com

Abstrak

Studi ini mencoba menganalisis faktor-faktor yang mendorong munculnya radikalisme di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan sekurang-kurangnya ada 3 faktor, yakni pertama, perkembangan di tingkat global, Kedua, penyebaran paham Wahabisme dan yang ketiga adalah kemiskinan. Situasi yang kacau di negara-negara Timur Tengah khususnya di Afghanistan, Palestina, Irak, Yaman, Mesir, Syiria, dan Turki, dipandang oleh kelompok-radikal sebagai akibat dari campur tangan Amerika, Israel, dan sekutunya. Pada saat yang sama, Masuknya faham Wahabisme yang mengagungkan budaya Islam ala Arab yang konservatif ke Indonesia telah ikut mendorong timbulnya kelompok eksklusif yang sering menuduh orang lain yang berada di luar kelompok mereka sebagai musuh, kafir dan boleh diperangi. Faktor ketiga adalah kemiskinan. Meski faktor ini tidak secara langsung berpengaruh terhadap merebaknya aksi radikalisme, namun perasaan sebagai elemen masyarakat yang termarginalkan dapat menjadi faktor pendorong bagi seseorang untuk terjebak dalam proganda radikalisme.

Abstract

This study tries to analyse factrors contributing to the rise of radicalism in Indonesia. Based on the study, there are at least three factors stimulating the rise of radical movement in Indonesia, namely : the chaotic situation in the Middle-Eastern countries, the spread of Wahhabism and the poverty. The turmoils in several Middle-Eastern countries, particularly in Afghanistan, Palestine, Iraq, Yemen, Egypt, Syria, and Turkey, are viewed by radical groups as a result of western interference. At the same time, the spread of Wahhabism glorifying Islamic, Arab culture into Indonesia

has created exclusive religious group which tend to justify people outside the group as infidels or enemies. The third factor is poverty. Although poverty does not directly affect the spread of radicalism, the sense of being marginalized among the elements of society can be a motivating factor for someone to be trapped in radicalism propaganda.

Kata Kunci: Radikalisme, Historisitas, Antropisitas

A. Pendahuluan

Secara historis munculnya Islam di Indonesia sangat damai dan toleransi relevan dengan apa yang diajarkan oleh para wali melalui sinkronitas budaya lokal, bahan saling dapat hidup damai berdampingan dengan umat lain yang hidup masa itu. Namun sangat disayangkan dengan perkembangan zaman dan tuntutan stratifikasi sosial di tengah masyarakat Indonesia yang begitu luas, maka bermunculanlah sekte-sekte, aliran-aliran, dan mazhab-mazhab baru yang mengatasnamakan Islam berkembang pesat sesuai dengan latar belakang kebudayaan dan kondisi alam yang eksis di daerah penganutnya.

Dari term di atas, dapat dicermati bahwa di Indonesia akhir-akhir ini banyak berkembang isu-isu radikalisme¹ di antaranya adalah kelompok yang mengklaim dirinya al-Qaeda dan ISIS, dimana keduanya menjadi isu global. Munculnya kelompok ini merupakan format perlawanan global kelompok radikal Islam terhadap ketidakadilan dunia. Hal ini dikaitkan dengan kebijakan miring pemimpin dunia terhadap Palestina, kesenjangan sosial-ekonomi di negara-negara muslim bahkan ekspansi budaya Barat yang dianggap merusak nilai-nilai Islam seperti hedonisme dan materialisme. Para pemimpin dunia Islam dianggap tidak berdaya dan tunduk pada kemauan Barat. Isu tersebut dengan cepat menyebar keseluruh penjuru dunia melalui jaringan maya, bukan saja di negara-negara Islam, tetapi juga di negara-negara Barat sebagai akibat kebijakan banyak negara yang memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok perlawanan yang lari dari negara masing-masing.

Di sisi lain, munculnya radikalisme di Indonesia menjadi nyata, seiring perubahan tatanan sosial dan politik, terlebih

¹ Christina Parolin, *Radical Spaces: Venues of Popular Politics in London, 1790-c. 1845* (Australia: ANU E Press, 2010), Cet.ke-1, h. 3.

setelah hadirnya orang-orang Arab muda dari Hadramaut Yaman ke Indonesia yang membawa ideologi baru ke tanah air, turut mengubah konstelasi umat Islam di Indonesia. Ideologi baru yang mereka bawa lebih keras dan tidak mengenal toleransi, sebab banyak dipengaruhi oleh mazhab maliki yang diadopsi dan diintrodusir oleh Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabi yang saat ini menjadi ideologi resmi pemerintah Arab Saudi. Di samping historisitas radikalisme di Indonesia dan pertumbuhannya begitu pesat, dan hal itu merupakan kemungkaran, maka antropisitas faham dimaksud harus dilakukan secara bijak dan cermat sebagaimana yang diintrodusir Ibnu Qayyim al-Jauziyah menegaskan bahwa ada empat dimensi di dalam memberikan solusi kemungkaran atau radikalisme: *pertama*, menyingkirkan kemungkaran dan menggantinya dengan kema'rufan; *kedua*, menyingkirkan kemungkaran dengan menguranginya walaupun tidak menghapuskan secara keseluruhan; *ketiga*, menyingkirkan kemungkaran dengan memunculkan kemungkaran serupa; dan *keempat*, menyingkirkan kemungkaran dengan memunculkan kemungkaran yang lebih jahat dari padanya. Dengan demikian dapat dicermati bahwa dimensi pertama dan kedua merupakan penanggulangan radikalisme yang disyari'atkan, sementara dimensi kedua merupakan penanggulangan radikalisme ijthadi, sedangkan dimensi keempat merupakan penanggulangan radikalisme yang diharamkan.

Berdasarkan paparan di atas, maka kajian ini sangat menarik untuk diketengahkan, karena ia merupakan kajian aktual dan kontemporer yang masih hangat untuk didiskusikan secara mendalam dan panjang lebar, sehingga tampak jelas peta persoalan yang akan dipaparkan. Secara ringkas, tulisan ini akan mencari alasan mengapa radikalisme muncul di Indonesia? Bagaimana sejarah kemunculannya, dan cara apa yang tepat dalam antropisitas radikalisme di Indonesia.

B. Pembahasan

Dalam catatan sejarah radikalisme Islam² semakin menggeliat pada pasca kemerdekaan hingga pasca reformasi, Sejak

² Pada awalnya Islam di Indonesia sangat dipuji dengan toleransinya.

Kartosuwirjo memimpin operasi 1950-an di bawah bendera Darul Islam (DI). Sebuah gerakan politik dengan mengatasnamakan agama, justifikasi agama dan sebagainya. Dalam sejarahnya gerakan ini akhirnya dapat digagalkan, akan tetapi kemudian gerakan ini muncul kembali pada masa pemerintahan Soeharto, hanya saja bedanya, gerakan radikalisme di era Soeharto sebagian muncul atas rekayasa oleh militer atau melalui intelijen melalui Ali Moertopo dengan Opsusnya, ada pula Bakin yang merekayasa bekas anggota DI/TII, sebagian direkrut kemudian disuruh melakukan berbagai aksi seperti Komando Jihad, dalam rangka memojokkan Islam. Setelah itu sejak jatuhnya Soeharto, ada era demokratisasi dan masa-masa kebebasan, sehingga secara tidak langsung memfasilitasi beberapa kelompok radikal ini untuk muncul lebih nyata, lebih militan dan lebih vokal, ditambah lagi dengan liputan media, khususnya media elektronik, sehingga pada akhirnya gerakan ini lebih tanpak.³

Setelah DI, muncul Komando Jihad (Komji) pada 1976 kemudian meledakkan tempat ibadah. Pada 1977, Front Pembebasan Muslim Indonesia melakukan hal sama. Dan tindakan teror oleh Pola Perjuangan Revolusioner Islam, 1978.⁴ Tidak lama kemudian, setelah pasca reformasi muncul lagi gerakan yang beraroma radikal yang dipimpin oleh Azhari dan Nurdin M. Top dan gerakan-gerakan

Namun kebesaran nama baik tersebut telah dirusak oleh beberapa peristiwa berdarah yang melibatkan agama sebagai salah satu faktor pemicunya. Secara perlahan namun pasti, kehadiran beberapa organisasi Islam radikal di Indonesia telah mencitrakan Islam sebagai agama teroris. Lebih lanjut lihat Kees Van Dijk and Nico J.G. Kaptein, *Islam, Politics, and change: The Indonesian Experience after the fall of Suharto* (Leiden University Press, 2016), Cet.ke-1, h. 13.

³Azumardi Azra, dalam Artikel Tempo "Radikalisme Islam Indonesia" 15 Desember 2002. Lebih jauh ditegaskan bahwa Radikalisme dan terorisme kini menjadi musuh "baru" umat manusia. Meskipun akar radikalisme telah muncul sejak lama, namun peristiwa peledakan bom akhir-akhir ini seakan mengantarkan fenomena ini sebagai "musuh kontemporer" sekaligus sebagai "musuh abadi". Banyak pihak mengembangkan spekulasi secara tendensius bahwa terorisme berpangkal dari fundamentalisme dan radikalisme agama, terutama Islam. Tak heran jika kemudian Islam seringkali dijadikan 'kambing hitam'. Termasuk dan terutama pada kasus bom paling fenomenal: WTC dan kasus termutakhir bom "Boston Marathon". Dalam Sofian Munawar Asgart, *Melawan Radikalisme dan Terorisme di Indonesia, Research Associate, The Interseksi Foundation, Jakarta*, h. 1.

⁴M. Zaki Mubarak, *Geneologi Islam Radikal di Indonesia*, (Jakarta :LP3ES, 2008).

radikal lainnya yang bertebar di beberapa wilayah Indonesia, seperti Poso, Ambon dan yang lainnya. Semangat radikalisme tentu tidak luput dari persoalan politik. Persoalan politik memang sering kali menimbulkan gejala-gejala tindakan yang radikal. Sehingga berakibat pada kenyamanan umat beragama yang ada di Indonesia dari berbagai ragamnya.

Dalam konstelasi politik Indonesia, masalah radikalisme Islam makin besar karena pendukungnya juga makin meningkat. Akan tetapi gerakan-gerakan ini lambat laun berbeda tujuan, serta tidak mempunyai pola yang seragam. Ada yang sekedar memperjuangkan implementasi syari'at Islam tanpa keharusan mendirikan "negara Islam", namun ada pula yang memperjuangkan berdirinya negara Islam Indonesia, di samping yang memperjuangkan berdirinya "kekhalifahan Islam", pola organisasinya pun beragam, mulai dari gerakan moral ideologi seperti Majelis Mujahidin Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sampai kepada gaya militer seperti Laskar Jihad, dan FPI.⁵

Di sisi lain, radikalisme adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Namun bila dilihat dari sudut pandang keagamaan dapat diartikan sebagai paham keagamaan

⁵Endang Turmudi (ed), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta :LIPI Press, 2005), h. 5. Paparan senada diekspresikan bahwa negara dengan komunitas Islam terbesar di dunia, Indonesia seringkali harus menjadi 'tertuduh' dalam beragam aksi teror yang kerap menyeruak akhir-akhir ini. Pengaitan-pengaitan peristiwa peledakan bom di tanah air dan dunia hampir selalu pertama kalinya dikaitkan dengan "fundamentalisme Islam". Contoh paling dekat misalnya pada peristiwa bom Boston Marathon, 15 April 2013 yang serta-merta juga dikait-kaitkan dengan gerakan fundamentalisme Islam. Fenomena ini seolah mengingatkan kembali peristiwa bom WTC yang amat mengharu biru itu. Presiden Amerika saat itu, George W. Bush, langsung menyebut Osama bin Laden sebagai representasi umat Islam yang dituding menjadi dalang. Pernyataan serupa juga pernah dilontarkan Dubes Amerika, Ralph Boyce yang secara spontan menuduh jaringan Al-Qaidah berada di balik teror bom Bali. Ralph Boyce bahkan menyebutkan keberadaan jaringan terorisme internasional Al-Qaidah itu telah beroperasi di Indonesia. Sementara pemimpin senior Singapura saat itu, Lee Kwan Yew bahkan mengatakan Indonesia sebagai sarang teroris. Tak heran pula jika kemudian Indonesia menjadi sorotan dunia dalam konteks isu terorisme. Lihat Sofian Munawar Asgart, *Melawan Radikalisme....*, h. 2.

yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari paham / aliran tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham/aliran untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayainya untuk diterima secara paksa.

Lebih jauh dipaparkan bahwa radikalisme menurut kamus besar bahasa Indonesia ikhtiar baru tahun 1995 adalah suatu paham aliran yang menghendaki perubahan secara drastic. (kamus besar bahasa Indonesia ikhtiar baru:1995). Sedangkan menurut kamus ilmiah populer radikalisme adalah inti dari perubahan. (bary, kamus ilmiah populer:1994). Sementara radikalisme agama berarti, perilaku keagamaan yang menyalahi syariat, yang mengambil karakter keras sekali antara dua pihak yang bertikai, yang bertujuan merealisasikan target-target tertentu, atau bertujuan merubah situasi sosial tertentu dengan cara yang menyalahi aturan agama.

Dari konteks di atas dapat dipahami bahwa radikalisme agama adalah perilaku keagamaan yang menghendaki perubahan secara drastis dengan mengambil karakter keras yang bertujuan untuk merealisasikan target-target tertentu. Secara historis, kemunculan kelompok radikal di kalangan umat Islam Indonesia bukanlah hal yang baru. Karena pada awal abad ke-20, dalam peningkatan semangat dan ekonomi kian parah di kalangan pribumi, radikalisme muslim diambil alih oleh kelompok Serikat Islam (SI).⁶ Gerakan radikalisme di Indonesia⁷ tidak seperti yang terjadi di Timur tengah yang sangat menekankan agenda-agenda politik.

Gerakan radikal Islam di Indonesia baru sebatas pada tuntutan dipenuhinya aspirasi Islam, seperti pemberlakuan syariat Islam atau piagam Jakarta.⁸

⁶Khamami zada, *Islam Radikalisme*, (Jakarta: Teraju, 2002), h. 87

⁷ Lihat Kees Van Dijk and Nico J.G. Kaptein, *Islam, Politics...*, h. 28.

⁸Azyumardi Azra, "Muslimin Indonesia: Viabilitas "Garis Keras" , dalam Gatra edisi khusus 2000, h. 45. Paparan sedikit berbeda bahwa pemerintah yang terus-menerus menekan kelompok Ahmadiyah dan Syiah, secara tidak langsung membangkitkan semangat organisasi militan untuk membasmi kelompok minoritas tersebut. Menurut dia, semangat militan yang semakin tumbuh tersebut

Kemunculan gerakan islam radikal di Indonesia disebabkan oleh dua faktor; Pertama, faktor internal dari dalam umat islam sendiri yang telah terjadi penyimpangan norma-norma agama. Kedua, faktor eksternal di luar umat Islam, baik yang dilakukan penguasa maupun hegemoni Barat, seperti kasus gerakan Warsidi, Salaman hafidz dan Imron atau yang dikenal sebagai komando Jihad telah membangkitkan radikalisme di Indonesia.⁹ Jihad sebenarnya menjadi simbol perlawanan yang efektif untuk menggerakkan perang melawan Barat. Kondisi inilah yang menyebabkan permusuhan yang terus menerus antara Islam dan Barat. Fenomena yang terjadi di Indonesia ketika umat islam bereaksi terhadap serangan Amerika Serikat pada Afghanistan. Di masa inilah, islam menemukan moment untuk menyuarakan aspirasi Islam (Solidaritas Islam). Karena itulah, kelompok Islam radikal seperti KISDI, Lakar Jihad, FPI, Ikhwanul Muslimin, dan Mujahidin bergerak menentang penyerangan AS. Bahkan, komando jihad juga dikirim ke Afghanistan sebagai bagian dari tugas suci.¹⁰

menyebabkan munculnya kembali keinginan untuk membentuk negara Islam di Indonesia. (Abba Gabriillin, Jakarta: COMPAS.Com.).

⁹Khamami zada, *Islam...*, h. 95. Papan senada ditegaskan bahwa Setidaknya ada tiga faktor yang menjadi akar paham radikal berkembang di Indonesia. Faktor pertama adalah perkembangan di tingkat global, dimana kelompok - kelompok radikal menjadikan situasi di Timur Tengah sebagai inspirasi untuk mengangkat senjata dan aksi teror. Apa yang terjadi di Afghanistan, Palestina, Irak, Yaman, Syria, dan seterusnya dipandang sebagai campur tangan Amerika, Israel, dan sekutunya. Adapun faktor kedua adalah terkait dengan kian tersebar luasnya paham Wahabisme yang mengagungkan budaya Islam ala Arab yang konservatif. Dalam kaitannya dengan radikalisme, Wahabisme dianggap bukan sekadar aliran, pemikiran, atau ideologi, melainkan mentalitas. Ciri mental itu antara lain gemar membuat batas kelompok yang sempit dari kaum muslimin, sehingga dengan mudah mereka mengatakan di luar kelompok mereka adalah kafir, musuh, dan wajib diperangi. Sementara itu faktor ketiga adalah karena kemiskinan, walaupun hal ini tidak berpengaruh langsung terhadap merebaknya aksi radikalisme. Hal utama yang kemungkinan membuat keterkaitan antara kemiskinan dan radikalisme adalah perasaan termarjinalkan. Situasi seperti itu menjadi persemaian subur bagi radikalisme dan terorisme. Bukan rahasia lagi, kelompok radikal menawarkan bayaran materi lumayan untuk merekrut anggota. Itu jadi daya tarik. Aksi teror mereka makna sebagai jihad; jika mati, mereka mati syahid. Tak ada balasan bagi kematian syahid selain surga. Dalam *Menelisik Akar-Akar Radikalisme di Indonesia*, Kompasiana, 22 Juli 2015.

¹⁰*Ibid.*, h. 97

Di sisi lain, aksi terorisme di Indonesia saat ini memang tengah menurun sejak awal tahun 2000-an. Namun akar terorisme, yaitu radikalisme agama, tetap tumbuh subur dan mendapatkan posisi di sebagian masyarakat. Selain radikalisme agama, aksi teror juga masih berisiko muncul akibat gesekan-gesekan lainnya, seperti anti persatuan, separatisme, dan lain-lain. Oleh karena imunitas harus senantiasa mengingat bahwa kita hidup di Indonesia, negeri yang terdiri dari keberagaman. Jika kita tidak bersikap tenggang rasa dan berpikiran terbuka, maka akar-akar radikalisme pun dapat leluasa masuk memengaruhi kita. Pemerintah juga perlu untuk menjadi lokomotif dalam pembangunan persatuan dan kesejahteraan bangsa guna menghindarkan negeri ini dari ancaman radikalisme yang memanfaatkan celah-celah ketidakadilan.

Sementara peneliti LIPI Anas Saidi mengatakan bahwa paham radikalisme ini terjadi karena proses Islamisasi yang dilakukan di kalangan anak muda ini berlangsung secara tertutup, dan cenderung tidak terbuka pada pandangan Islam lainnya, apalagi yang berbeda keyakinannya. Dia menegaskan jika pemahaman ini dibiarkan bisa menyebabkan disintegrasi bangsa karena mereka menganggap ideologi pancasila tidak lagi penting.¹¹ “Proses Islamisasi ini terjadi secara monolitik dan terjadi masjid dikuasai kelompok tertentu yang konsekuensi pengikutnya adalah sikap intoleran, dan jika nanti mereka kemudian menjadi pejabat, misalnya menjadi menteri atau menjadi apa sajalah, kalau tidak punya toleransi dan masih punya benak untuk mengganti pancasila, itu yang saya kira ada kecemasan. Anas mengatakan lebih lanjut bahwa proses Islamisasi di kalangan anak muda itu harus diimbangi dengan proses Islamisasi yang terbuka, bervariasi dan penyelesaian perbedaan pendapat itu dapat diselesaikan tidak dengan kekerasan. Jika itu dilakukan, Anas melihat ada sisi positif

¹¹Sri Lestari, *Anak-Anak Muda Indonesia Makin Radikal*, BBC Indonesia, 18 Februari 2016, h. 1. Lebih jauh Anas mengungkapkan dalam penelitian yang dilakukan pada 2011 di lima universitas di Indonesia UGM, UI, IPB, Unair, Undip menunjukkan peningkatan pemahaman konservatif atau fundamentalisme keagamaan khususnya di kalangan mahasiswa di kampus-kampus umum. Dan Radikalisme di kalangan pelajar dan mahasiswa itu terjadi pasca reformasi, dengan menyebar melalui Jamaah Tarbiyah (Ikhwanul Muslimin), termasuk HTI dan salafi yang merupakan bagian dari gerakan Islam transnasional.

proses Islamisasi ini dapat memberikan generasi muda yang lebih dapat menerima perbedaan.

Selanjutnya antropisitas radikalisme dapat dilakukan melalui Jalur Peran Pemerintah; Peran Institusi Keagamaan dan Pendidikan; Peran Masyarakat Sipil; Beberapa Isu Kritis; Peran Deradikalisasi; Rehabilitasi dan Reintegrasi; dan Pendekatan Kesejahteraan. Paparan detail komponen antropisitas radikalisme dimaksud dapat dicermati berikut ini.

1. Peran Pemerintah

Apa peran pemerintah? Harus ada pembedaan soal peran (kebijakan) pemerintah yang berkaitan dengan (1) ekstremisme keagamaan dan (2) kekerasan yang muncul karena ekstremisme (religious extremism based violence). Untuk yang pertama, kebijakan pemerintah dalam menanggulangi ekstremisme keagamaan (religious extremism) dipandang relatif. Secara umum, kebijakan pemerintah tentang pengurangan kekerasan sudah nampak jelas karena kita punya UU anti terorisme. Namun untuk ekstremisme keagamaan belum bisa dikatakan jelas karena jika ekstremisme belum mewujud menjadi tindakan statusnya tidak bisa diapa-apakan oleh hukum kita. Sebetulnya ada mekanisme yang bisa digunakan untuk menanggulangi masalah ekstremisme keagamaan lewat *hate speech* (kebencian) tapi hukum kita belum mengatur masalah itu secara khusus. Meskipun belum berupa tindakan, namun ujaran kebencian ini yang sering kita jumpai dimana-mana. Kita lumrah menemukan di banyak pengajian, tabligh akbar, media sosial dan bahkan di TV-TV yang memuatkan ujaran kebencian atas pihak lain.

Ujaran kebencian ini jika terus menerus berlanjut akan mampu memprovokasi masyarakat dan bisa menggiring pada tindakan kekerasan. Sementara untuk kekerasan berbasis agama seperti terorisme, kebijakan negara sudah cukup memadai dengan adanya UU No. 15/2003 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun kemampuan institusi negara untuk melaksanakan kebijakan tersebut pada tataran praktik masih perlu penyempurnaan. Kekurangan yang paling jelas misalnya adalah adanya kesenjangan antara teori (kebijakan) dan praktik

(implementasi) di samping juga persoalan-persoalan seperti kurangnya sumber daya manusia dan budaya etos kerja yang lemah di kalangan penegak hukum. Salah satu cetak biru dari pemerintah dalam hal penanggulangan kekerasan berbasis agama adalah proyek deradikalisasi. Deradikalisasi adalah kebijakan penting yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi atau mengembalikan radikalisme keagamaan kepada situasi yang normal, tidak radikal. Melalui pendirian BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2011), Pemerintah melakukan program deradikalisasi sebagaimana tercermin dalam fungsi BNPT yang kesembilan: “pengoperasian Satuan Tugas-Satuan Tugas dilaksanakan dalam rangka pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme.” Istilah deradikalisasi secara harfiah sudah disebutkan dalam fungsi BNPT, namun jika saya tidak salah pemerintah secara resmi tidak memiliki definisi deradikalisasi. Lalu apa makna deradikalisasi? Saya melihat definisi deradikalisasi yang diberikan oleh Yayasan Lazuardi Birru, lembaga ini konon pernah sangat aktif melakukan riset-riset soal terorisme dan deradikalisasi, dalam websitenya mendefinisikan deradikalisasi sebagai:

“Segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial-budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terespose paham radikal dan/atau prokekerasan. Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, re-edukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi simpatisan, sehingga timbul rasa nasionalisme dan mau berpartisipasi dengan baik sebagai Warga Negara Indonesia.”

Lazuardi Birru juga merinci hal-hal yang dilakukan dalam rangka deradikalisasi: (a) melakukan counter terrorism, (b) mencegah proses radikalisme, (c) mencegah provokasi, penyebaran kebencian, permusuhan antar umat beragama, (d) mencegah masyarakat dari indoktrinasi, (e) meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak paham terror (terorisme), dan (f) memperkaya khazanah atas perbandingan paham. Berdasarkan definisi di atas dan juga cakupan

kerjanya maka deradikalisasi diharapkan bukan hanya menjadi tugas pemerintah, namun menjadi tugas semua pihak di dalam wilayah negara, masyarakat sipil dan juga kalangan bisnis.

2. Institusi Keagamaan dan Pendidikan.

Apa yang diharapkan dari mereka untuk berperan? Sesuai dengan wataknya, institusi keagamaan dan pendidikan tidak bisa dituntut di luar proporsi mereka. Jika mereka berperan dalam menanggulangi dampak ekstremisme keagamaan maka sifatnya itu adalah sukarela dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak ektrimisme keagamaan. Institusi keagamaan seperti pesantren dan sekolah-sekolah agama bisa berperan dalam menanggulangi dampak ekstremisme keagamaan melalui pemberian materi pembelajaran agama yang mengutamakan gagasan-gagasan Islam yang *rahmatal lil alamin* dan toleran. Meskipun lembaga seperti pesantren itu adalah lembaga pengajaran agama, namun sepanjang sejarah kita, pesantren-pesantren di Indonesia pada ghalibnya adalah lembaga yang sangat toleran dan terbuka. Dalam memegang agama, mereka bukan ekstrem namun *pious* (taqwa). Ketaqwaan sangat berbeda dengan ekstrem, ia lebih individual dan banding komunal. Sementara ekstremisme keagamaan itu lebih bersifat komunal dibandingkan individual. Pesantren kita dalam memegang agama bersifat tengah-tengah sebagaimana anjuran populer, *khayr al-umūr awsatuhu*. Penyemaian pendidikan keagamaan yang demikian ini adalah sumbangan terbesar yang diberikan oleh pesantren.

3. Masyarakat Sipil

Masyarakat Sipil yang saya maksud di sini adalah kelompok masyarakat yang bukan merupakan bagian dari negara (the state) dan juga bukan bagian dari lembaga bisnis dan ekonomi (the economical). Contoh dari Masyarakat Sipil adalah ormas semacam NU, Muhammadiyah di samping juga LSM-LSM. Pada umumnya, Ormas-ormas besar Islam seperti NU dan Muhammadiyah memiliki pandangan yang sama soal dampak yang diakibatkan oleh ekstremisme keagamaan. Sejalan dengan NU dan Muhammadiyah adalah MUI yang sudah mengeluarkan fatwa tentang keharaman tindakan terorisme. Berdasarkan paparan di atas, dari segi

ekstremisme keagamaan yang berdampak nyata seperti terorisme, sikap lembaga keagamaan sangat jelas, namun untuk ekstremisme keagamaan *par excellence*, maka masyarakat sipil masih bersikap ambigu. Misalnya, pada satu sisi, mereka mengutuk pelbagai bentuk kekerasan bermotif agama seperti terorisme dan lainnya, namun pada sisi yang lain mereka tidak punya cara pandang dan sikap yang jelas pada wacana keagamaan yang menganjurkan kebencian. Atas nama penghinaan keyakinan, fatwa-fatwa keagamaan yang memicu pada sikap ekstremisme dan bahkan tindakan berbasis agama tetap berjalan. Misalnya, NU, Muhammadiyah dan MUI mengutuk terorisme namun mereka tidak berbicara apa-apa soal kekerasan yang menimpa kaum Syiah dan Ahmadiyah. Sampai sekarang, kita tidak bisa menyelesaikan ekstremisme keagamaan yang terjadi di internal umat Islam sendiri. Suasana sekarang adalah suasana penuh propaganda dan setiap upaya yang diupayakan untuk mencari jalan keluar distigmatisasi dengan hal-hal yang buruk. Saya beri contoh, beberapa waktu lalu RMI –Rabithah Ma’ahid al-Islamiah–mengeluarkan kampanye AYOMONDOK. Kampanye ini ditujukan agar kita bisa kembali ke pesantren karena pesantren memberikan cara pembelajaran agama yang mendalam dan dekat dengan kultur keIndonesiaan yang wasatiyyah. Namun apa yang terjadi bahwa karena kebencian yang sudah ada dibenak kalangan konservatif, kampanye #AYOMONDOK distigmatisasi sebagai liberal. Hal-hal seperti ini adalah tantangan bagi seluruh kalangan yang memiliki pandangan bahwa ekstremisme bukan jalan bagi Islam di Indonesia sekarang maupun masa depan.

C. Beberapa Isu Kritis

Isu-isu kritis ini saya angkat dari riset yang saya lakukan beberapa bulan lalu tentang “pengurangan ekstremisme keagamaan dan reintegrasi eks-teroris di dalam masyarakatnya.” Karenanya, dalam catatan kritis ini secara spesifik saya mengarahkan pada salah satu dampak ekstremisme keagamaan yang paling kita kenal dan rasakan yaitu terorisme. Riset ini saya lakukan di Jakarta dan Surakarta dengan pendekatan kualitatif (survei publik) dan kualitatif –wawancara dengan eks-teroris, pejabat pemerintah dan kalangan masyarakat sipil. Berikut ini beberapa isunya:

1. Deradikalisasi

Berdasarkan hasil wawancara saya, deradikalisasi adalah proyek pemerintah yang mendapat kritik dari mantan teroris dan juga beberapa aktivis kemanusiaan. Eks-teroris menganggap jika deradikalisasi itu kurang efektif karena lebih mengarah pada aspek de-ideologisasi daripada aspek kemanusiaan. Mereka mengusulkan agar pendekatan pemerintah dalam penanggulangan terorisme yang diutamakan adalah pendekatan non-keamanan. Menurut mereka, ideologi adalah hal yang mendasar bagi mereka karenanya sulit untuk dihilangkan dari benak mereka. Meskipun mereka—mantan teroris—sudah kembali ke dalam masyarakat (reintegrasi), namun untuk mengatakan mereka sudah meninggalkan ideologi mereka masih sangat jauh. Bagi mereka, segala bentuk upaya pemerintah untuk melunakkan mereka melalui jalan ideologi akan sulit. Karenanya, pemerintah, menurut mereka, lebih baik mengutamakan jalan kesejahteraan. Bagi mantan teroris misalnya mereka sudah cukup senang apabila bisa kembali ke dalam masyarakat mereka dan memiliki pekerjaan untuk menghidupi keluarga mereka. Dua informan yang saya wawancarai misalnya meskipun sudah kembali kepada masyarakat dengan sukses namun tetap apa yang mereka lakukan pada masa lalu adalah sesuatu yang tidak sepenuhnya salah. Jihad memang bisa dilaksanakan namun waktu dan tempat tidak bisa dipilih sembarangan. Mereka mengakui jika jihad yang sudah mereka lakukan tidak sesuai dengan syarat jihad (*fiqh al-jihad*). Bahkan mereka mengutip Osama Bin Laden untuk menjustifikasi perbuatan mereka sebagai hal yang tidak tepat untuk dilaksanakan di Indonesia.

2. Rehabilitasi dan Reintegrasi

Ketika eks-teroris itu dinyatakan bebas bersyarat, maka mereka kembali kepada masyarakat dimana mereka hidup (*habitus*). Ketika mereka kembali, paham mereka harus berubah. Inilah yang dimaksud dengan rehabilitasi. Tanpa adanya perubahan *mindset* mereka ke arah yang lebih baik (*restoration*). Rehabilitasi bisa dimaknai sebagai upaya menolong orang kembali kepada posisi atau status yang normal. Reintegrasi bagi sebagian kalangan diidentikkan dengan rehabilitasi namun sebagian dinyatakan sebagai proses lanjutan setelah rehabilitasi.

Pemerintah sampai sejauh ini tidak memiliki kerangka yang jelas tentang rehabilitasi dan reintegrasi meskipun kedua ide ini hal yang penting dalam rangka penanggulangan dampak terorisme. Selama ini yang ada adalah pendampingan BAPAS terhadap para teroris yang sudah dinyatakan bebas bersyarat. Dalam bebas bersyarat ini mereka boleh kembali kepada masyarakat, namun mereka harus lapor secara periodik ke BAPAS setempat. Namun ternyata proses rehabilitasi dan reintegrasi tidak semudah yang dibayangkan. Sering kali mereka mengalami kesulitan dalam rehabilitasi, proses kembali ke masyarakat. Mereka menghadapi stigmatisasi dari lingkungan sekitar. Dalam sebuah kasus di Solo, BAPAS merasakesulitan untukmemberipenyadaran padamasyarakat bahwa mantan teroris juga berhak untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Namun jika masyarakatnya tetap menolak, BAPAS, lembaga terakhir yang berhubungan dengan mantan napi teroris juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dari kasus ini pemerintah perlu memikirkan masalah rehabilitasi dan reintegrasi.

3. Pendekatan Kesejahteraan

Deradikalisasi dianggap masih mengutamakan pendekatan keamanan dibandingkan dengan kesejahteraan. Berdasarkan riset saya, mereka menginginkan kesejahteraan. Mengapa banyak mantan teroris yang kembali beraksi lagi, salah satunya karena mereka gagal dalam mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarga mereka. Karena keadaan yang sulit inilah sehingga mereka kembali kepada jaringan lamanya karena merekalah yang bersedia mensupply kebutuhan mereka. Inilah kemudian yang melahirkan teori pendekatan ekonomi dalam penanggulangan terorisme dan ekstremisme keagamaan.

D. Penutup

Dari Paparan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: Radikalisme muncul di Indonesia disebabkan seiring perubahan tatanan sosial dan politik. terlebih setelah kehadiran orang-orang Arab muda dari Hadramaut Yaman ke Indonesia yang membawa ideologi baru ke tanah air, turut mengubah konstelasi umat Islam di Indonesia. Ideologi baru yang mereka bawa lebih keras dan tidak mengenal toleransi, sebab banyak dipengaruhi oleh mazhab

pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabi yang saat ini menjadi ideologi resmi pemerintah Arab Saudi.

Selanjutnya historisitas munculnya radikalisme di Indonesia disebabkan oleh tiga faktor mendasar, yaitu Faktor pertama adalah perkembangan di tingkat global, dimana kelompok - kelompok radikal menjadikan situasi di Timur Tengah sebagai inspirasi untuk mengangkat senjata dan aksi teror. Apa yang terjadi di Afghanistan, Palestina, Irak, Yaman, Syiria, dan seterusnya dipandang sebagai campur tangan Amerika, Israel, dan sekutunya. Adapun faktor kedua adalah terkait dengan kian tersebar luasnya paham Wahabisme yang mengagungkan budaya Islam ala Arab yang konservatif. Dalam kaitannya dengan radikalisme, Wahabisme dianggap bukan sekadar aliran, pemikiran, atau ideologi, melainkan mentalitas. Ciri mental itu antara lain gemar membuat batas kelompok yang sempit dari kaum muslimin, sehingga dengan mudah mereka mengatakan di luar kelompok mereka adalah kafir, musuh, dan wajib diperangi. Sementara itu faktor ketiga adalah karena kemiskinan, walaupun hal ini tidak berpengaruh langsung terhadap merebaknya aksi radikalisme. Hal utama yang kemungkinan membuat keterkaitan antara kemiskinan dan radikalisme adalah perasaan termarjinalkan. Situasi seperti itu menjadi persemaian subur bagi radikalisme dan terorisme.

Sedangkan cara tepat di dalam antropisitas radikalisme di Indonesia adalah melalui jalur Peran Pemerintah; Peran Institusi Keagamaan dan Pendidikan; Peran Masyarakat Sipil; Beberapa Isu Kritis; Peran Deradikalisasi; Rehabilitasi dan Reintegrasi; dan Pendekatan Kesejahteraan. []

Daftar Pustaka

- Amal, Ichlasul, Cornelis Lay dan Erwin Endaryanta, "Mengenal Keamanan" dalam *Bahan Perkuliahan Politik Keamanan dan Pembangunan*, Program Pascasarjana, Yogyakarta: Fisipol-UGM, 2010.
- Azra, Azumardi dalam Artikel Tempo "Radikalisme Islam Indonesia, 15 Desember 2002

- , “Muslimin Indonesia: Viabilitas “Garis Keras” , dalam Gatra edisi khusus 2000,
- Budiman, Arief. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Denny JA, “Al-Qaidah di Indonesia?” dalam *Kompas*, Jakarta: Edisi Kamis, 26 September 2002.
- Dijk, Van, Kees and Kaptein, J.G., Nico, *Islam, Politics, and change: The Indonesian Experience after the fall of Suharto*, Leiden University Press, 2016, Cet.ke-1
- Hendropriyono, AM., *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2009
- Parolin, Christina, *Radical Spaces: Venues of Popular Politics in London, 1790-c. 1845*, Australia: ANU E Press, 2010, Cet.ke-1
- Pujianto, Hendriawan. “Distorsi Jurnalisme dalam Isu Terorisme” dalam *Jawa Pos*, Surabaya: Edisi Senin, 25 November 2002.
- Mubarak, Zaki, M., *Geneologi Islam Radikal di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2008
- Muzani, Saiful, *Benturan Peradaban: Sikap dan Perilaku Islamis Indonesia terhadap Amerika*, Jakarta: Freedom institute-PPIM, dan Penerbit Nalar, 2005
- Muhaimin, Yahya, *Bambu Runcing dan Mesiu: Masalah Kebijakan Pembinaan Pertanian Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- Riyadi, Ahmad Ali. “Studi Islam dan Radikalisme Pendidikan dalam Konteks Masyarakat Majemuk” dalam *Annual Conference on Islamic Studies (ACIS)*, Surakarta, 2-5 November 2009.
- Turmudi, Endang (ed)., *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2005
- Working Group on Security Sector Reform, *Monograph-7: Kajian Kritis Paket Perundangan di Bidang Pertahanan Keamanan*. Jakarta: Propatria, 2006.
- Zada, Khamami *Islam Radikalisme*, Jakarta: Teraju, 2002.